

# PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA 2014

## OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
  - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
  - 1.2 Pengurangan Pengangguran
  - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/ Kabupaten
  - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
  - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
  - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
  - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
  - 3.1 Transformasi Struktural (Industrialisasi) Berjalan Lambat
  - 3.2 Produktivitas Sektor Pertanian Masih Rendah
  - 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Masih Perlu Didorong Investasi
  - 3.4 Kondisi Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai untuk Mendukung Logistik yang Efisien
  - 3.5 Kualitas Sumber Daya Manusia
  - 3.6 Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kurang Mendukung Pertumbuhan
  - 3.7 Daya Dukung Lingkungan Berkurang
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
  - 5.1 Isu Strategis Daerah
  - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH



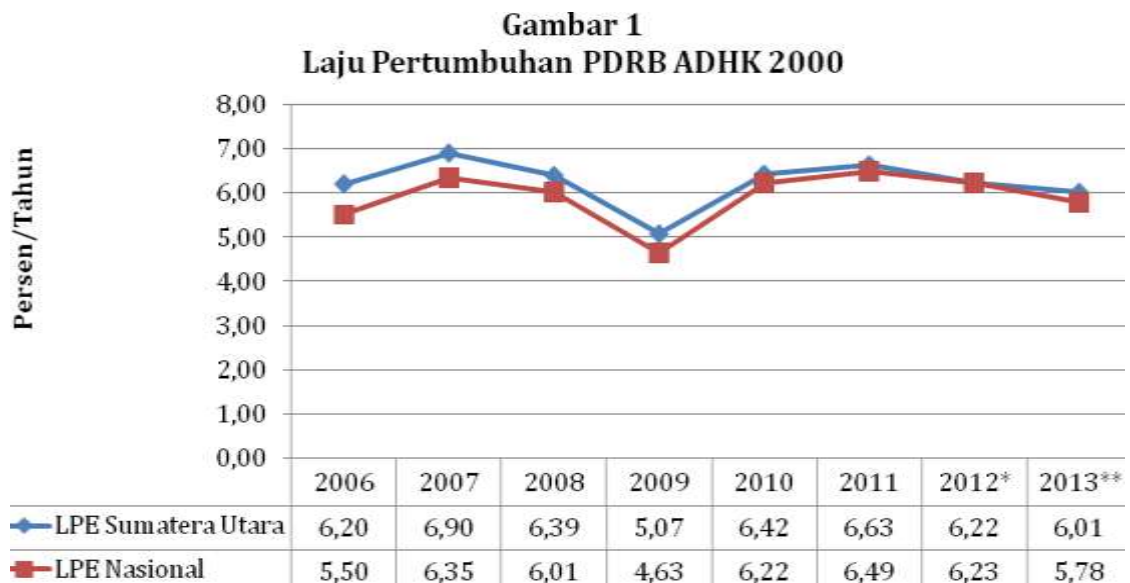
# Perkembangan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2014

## SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

### A. Perkembangan Indikator Kinerja Utama

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi

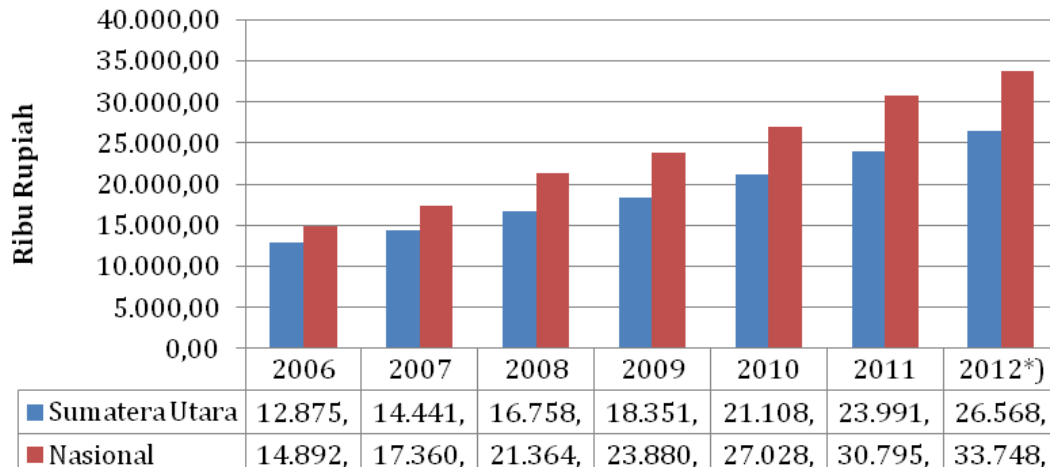
Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional, terutama melalui peran industry makan dan minuman, industri logam, dan sektor perkebunan kelapa sawit, kopi dan kakao. Sumatera Utara juga merupakan penghasil pangan terbesar di luar Jawa untuk komoditas padi dan jagung. Kinerja perekonomian Sumatera Utara cukup baik selama periode tahun 2006-2013 yang tumbuh dengan laju rata-rata 6,23 persen (Gambar 1). Pada tahun 2012 kontribusi Sumatera Utara dalam pembentukan PDRB wilayah Sumatera sebesar 21,94 persen, dan memberikan sumbangan sebesar 5,2 persen pada pembentukan PDB nasional.



Sumber: BPS, 2013

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB per kapita di Sumatera Utara berada di bawah rata-rata nasional, menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Sumatera Utara relatif tidak baik secara nasional. Jika pada tahun 2006 rasio PDRB per kapita antara Sumatera Utara dan rata-rata nasional adalah 86,46 persen maka pada tahun 2012 rasionya menurun menjadi 78,72 persen (Gambar 2).

**Gambar 2**  
**PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku**

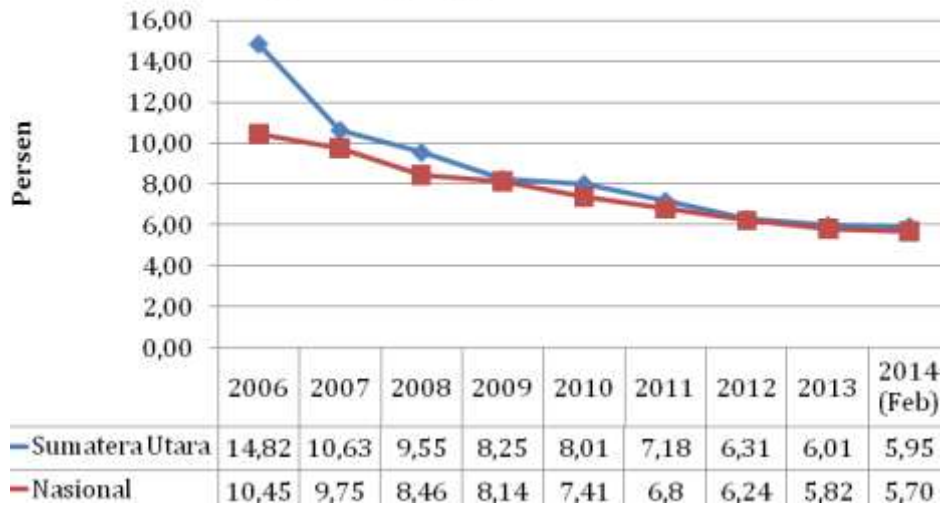


Sumber: BPS, 2013

## 2. Pengurangan Pengangguran

Indikator lain yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pengangguran. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi daerah terlihat mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai sehingga tingkat pengangguran berhasil ditekan. Selama periode Tahun 2006-2013 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Utara berkurang sebesar 8,81 persen (Gambar 3). Tingkat pengangguran terbuka berada pada angka tertinggi pada tahun 2006 sebagai dampak kenaikan harga BBM, namun setelah itu perekonomian daerah mampu menurunkan tingkat pengangguran secara signifikan.

**Gambar 3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**

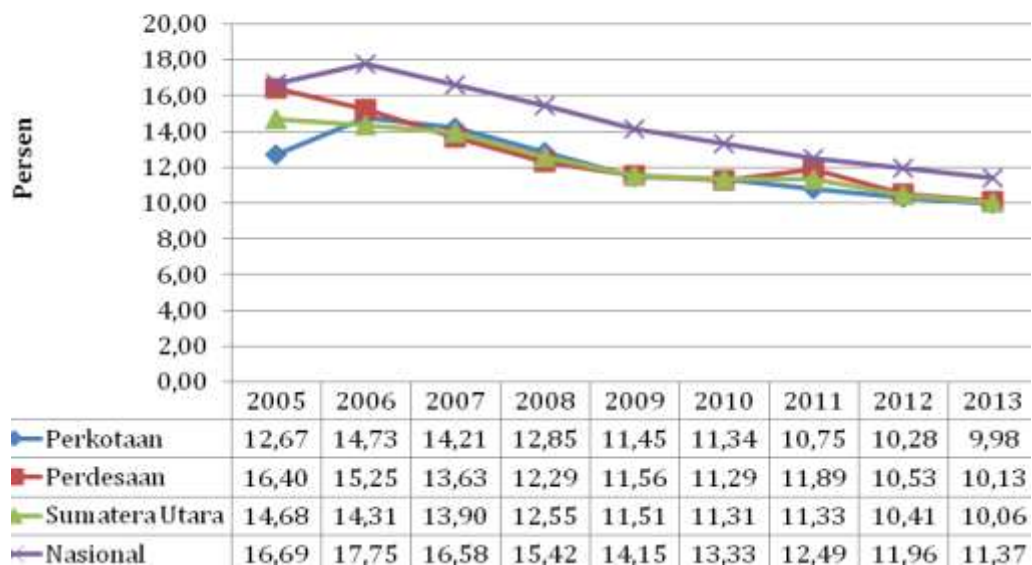


Sumber: BPS, 2014

### 3. Pengurangan Kemiskinan

Peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan tingkat pengangguran juga diiringi oleh penurunan tingkat kemiskinan daerah. Pada tahun 2006-2013 persentase penduduk miskin turun secara konsisten baik di perkotaan maupun di perdesaan (Gambar 4). Penurunan penduduk miskin di perdesaan menunjukkan bahwa perekonomian daerah perdesaan relatif tidak terkena dampak buruk kenaikan harga BBM pada tahun 2006. Secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara lebih rendah dari persentase di tingkat nasional. Sebagai perbandingan pada tahun 2013 persentase penduduk miskin Sumatera Utara sebesar 10,06 persen, sedangkan di tingkat nasional angkanya mencapai 11,37 persen.

**Gambar 4**  
**Persentase Penduduk Miskin**



Sumber: BPS, 2014

## B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

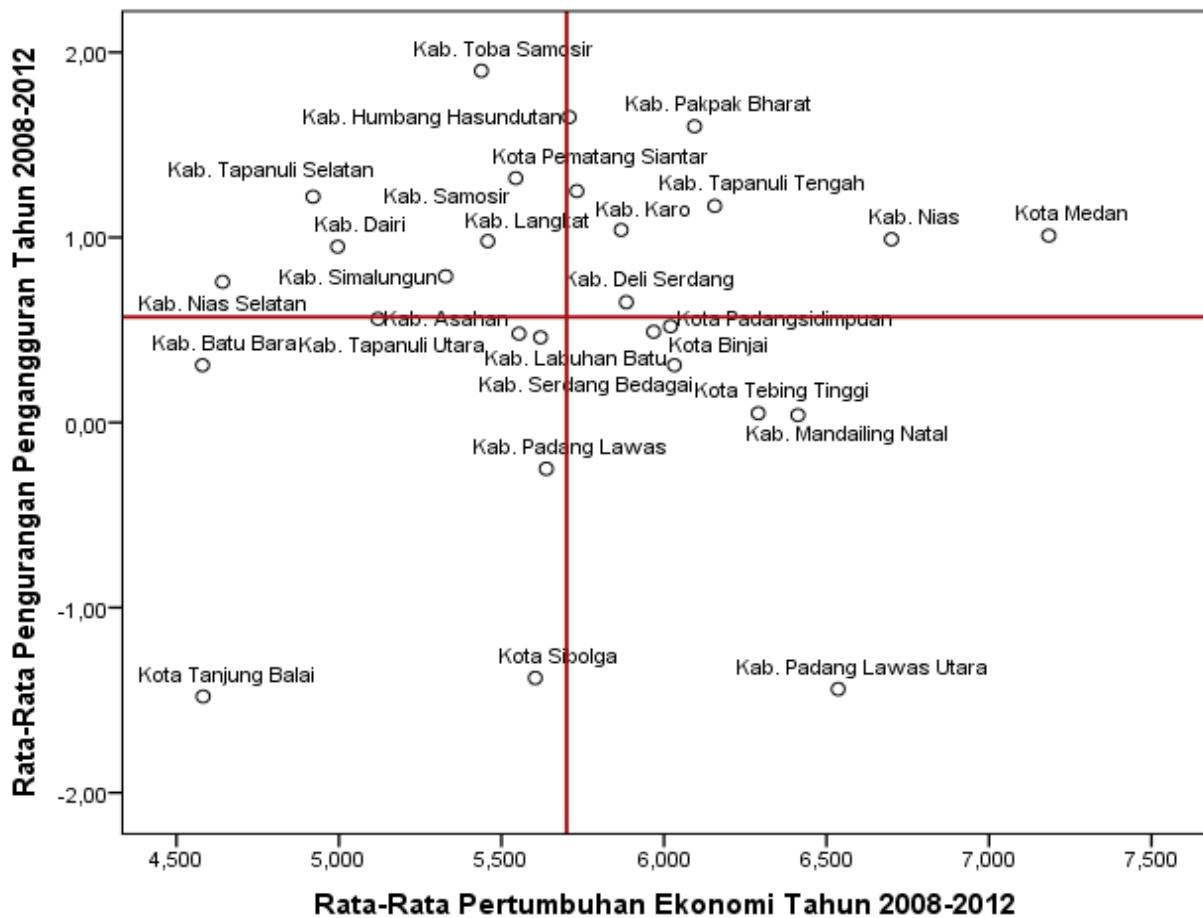
Persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 5). *Pertama*, Kabupaten Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Karo, Deli Serdang, Kota Pematang Siantar, dan Kota Medan termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

*Kedua*, Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Samosir, Dairi, Simalungun, Nias Selatan, dan Langkat yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

*Ketiga*, Kabupaten Asahan, Batu Bara, Tapanuli Utara, Labuan Batu, Padang Lawas, Sibolga, dan Kota Tanjung Balai terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

*Keempat*, Kabupaten Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Koba Binjai, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Tebing Tinggi terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

**Gambar 5**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan**  
**Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

## 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 6 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan selama tahun 2008-2012 dengan penjelasan sebagai berikut.

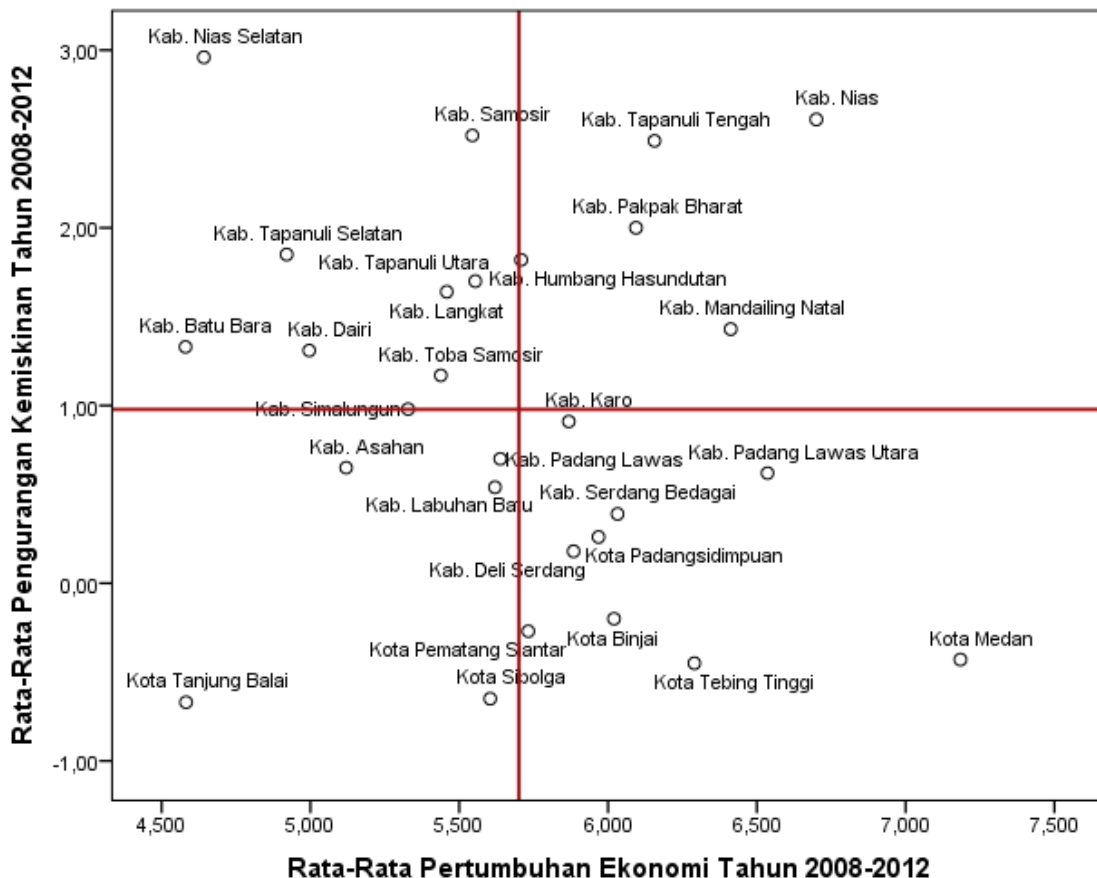
*Pertama*, Kabupaten Nias, Tapanuli Tengah, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, dan Humbang Hasundutan merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan.

*Kedua*, Kabupaten Samsir, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, Toba Samosir, Dairi, Nias Selatan, Batu Bara, dan Simalungun terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan



kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2012**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

*Ketiga*, Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, Padang Lawas, Labuan Batu, dan Kota Sibolga terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

*Keempat*, Kabupaten Karo, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Pdeli Serdang, Kota Padang Sidempuan, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, dan



Kota Medan terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

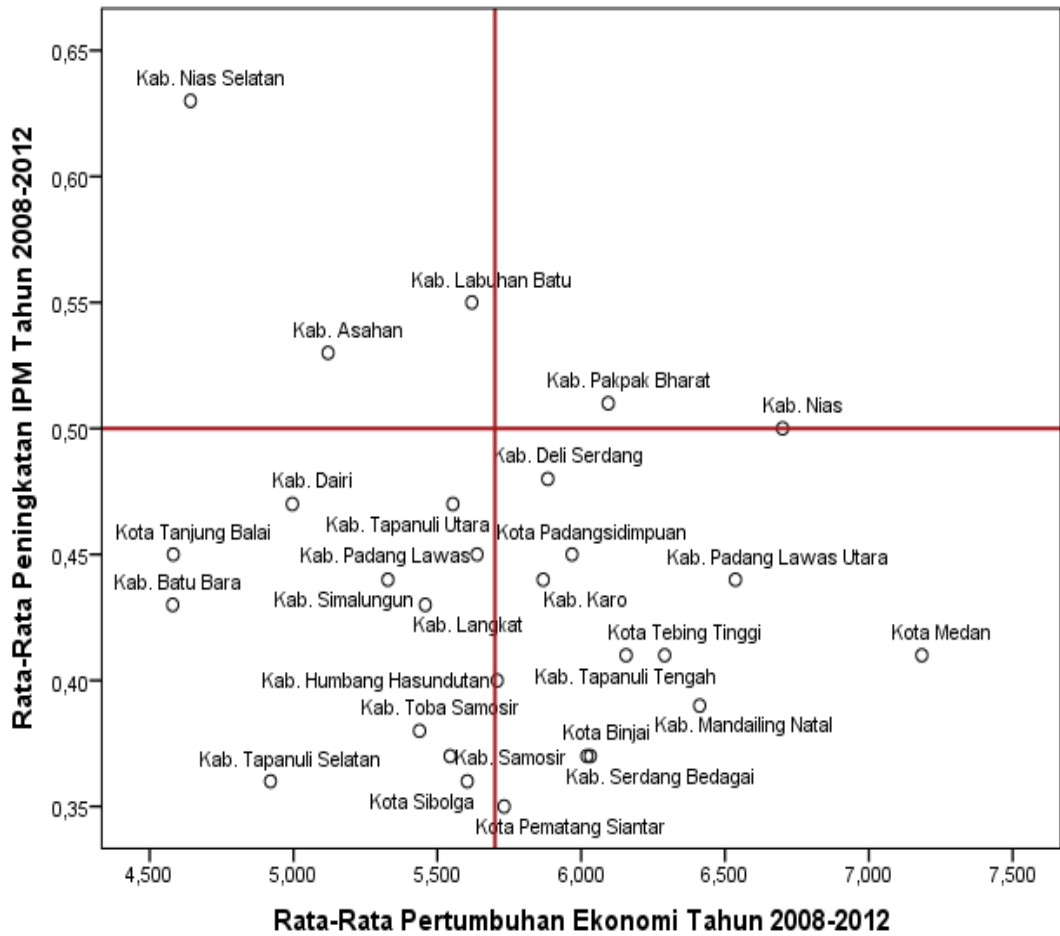
Distribusi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut (Gambar 7). *Pertama*, Kabupaten Nias dan Pakpak Bharat merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

*Kedua*, Kabupaten Nias Selatan, Asahan, dan Labuan Batu yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

*Ketiga*, Kabupaten dairi, Tanjung Balai, Batu Bara, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Simalungun, Langkat, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Tapanuli Selatan, Samosir, dan Kota Sibolga terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

*Keempat*, Kabupaten Deli Serdang, Karo, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, Kota Padang Sidempuan, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kota Pematang Siantar terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

**Gambar 6**  
**Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012**

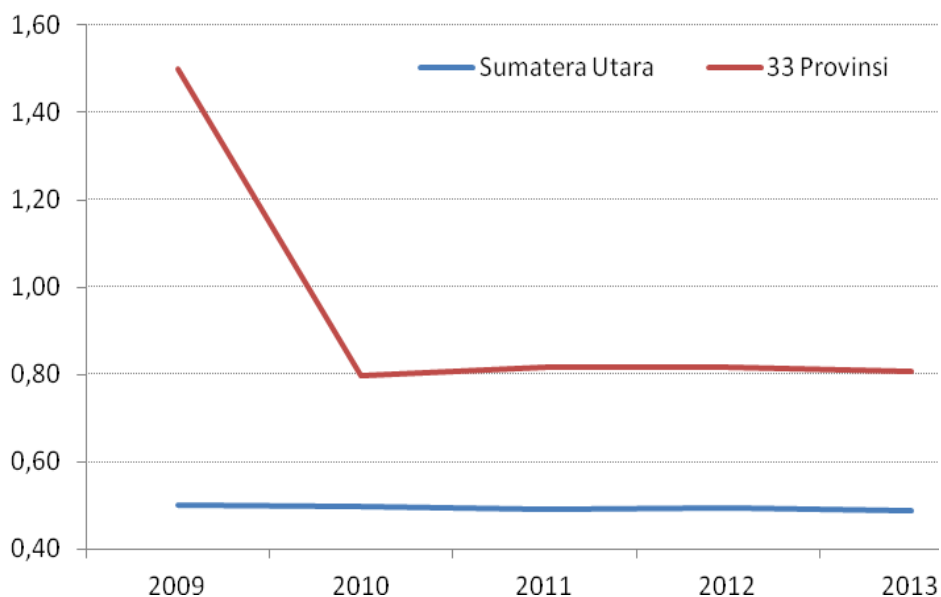


Sumber: BPS, 2012 (diolah)

#### 4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 tergolong sedang. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Kesenjangan ekonomi di Sumatera Utara dikarenakan perbedaan struktur ekonomi masyarakat yang tinggal di perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini menghadapkan Sumatera Utara pada tantangan untuk meningkatkan, pemeratakan, dan memperluas jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya, serta jangkauan informasi sampai ke seluruh pelosok daerah.

**Gambar 8**  
**Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson) 2009-2013**



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara cukup tinggi walaupun distribusi pendapatannya kurang merata di seluruh kabupaten/ kota di provinsi ini, terlihat dari terdapatnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah (Tabel 1). Pendapatan perkapita tertinggi di Sumatera Utara adalah di Kota Binjai dan Kota Sibolga.

**Tabel 1**  
**Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2007-2012 (000/jiwa)**

Kab/ Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nias	6.942	7.953	7.494	8.655	9.801	10.836
Mandailing Natal	-	-	7.883	8.904	10.070	11.113
Tapanuli Selatan	-	-	6.210	7.185	8.152	9.033
Tapanuli Tengah	-	-	14.253	15.868	18.101	19.823
Tapanuli Utara	6.585	7.554	8.422	9.151	10.463	11.701
Toba Samosir	8.795	9.611	10.422	11.890	13.419	14.943
Labuhan Batu	5.327	5.689	6.145	7.046	8.137	8.906
Asahan	5.393	5.918	6.494	7.672	8.678	9.559
Simalungun	5.540	6.034	6.548	7.339	8.188	9.033
Dairi	10.076	11.418	12.263	13.591	14.750	16.080
Karo	14.069	15.939	17.702	19.780	22.075	25.135
Deli Serdang	14.655	16.775	16.312	18.247	20.407	22.434
Langkat	-	-	19.137	21.577	24.250	26.925
Nias Selatan	-	-	20.103	22.527	25.339	28.034
Humbang Hasundutan	12.512	14.433	15.724	17.795	20.237	22.683

<b>Kab/ Kota</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Pakpak Bharat	9.291	10.241	11.313	12.638	14.088	15.711
Samosir	10.622	11.561	12.574	13.953	15.505	17.306
Serdang Bedagai	13.454	14.911	16.350	18.934	21.551	23.724
Batu Bara	15.793	17.753	19.583	22.120	24.970	27.453
Padang Lawas Utara	11.951	13.769	15.330	17.560	20.334	22.691
Padang Lawas	5.989	6.506	7.007	7.723	8.353	9.110
Labuhan Batu Selatan	10.435	11.830	12.901	14.329	16.114	18.193
Labuhan Batu Utara	6.051	6.644	7.300	8.150	9.128	10.135
Nias Utara	10.543	11.480	12.615	13.916	15.197	16.610
Nias Barat	10.792	12.552	14.272	16.277	18.178	20.385
Kota Sibolga	31.073	35.551	38.857	43.977	50.066	55.133
Kota Tanjung Balai	12.717	14.609	16.104	18.226	19.916	21.954
Kota Pematang Siantar	14.344	16.440	18.097	19.220	21.643	23.491
Kota Tebing Tinggi	13.315	14.855	16.008	17.687	19.129	20.670
Kota Medan	11.463	12.833	14.142	15.791	17.795	20.058
Kota Binjai	26.909	31.479	34.813	39.583	44.214	49.652
Kota Padang Sidempuan	13.873	15.832	17.672	20.015	22.947	26.347
Kota Gunung Sitoli	8.794	9.775	10.261	10.915	11.918	12.886
<b>Sumatera Utara</b>	<b>14.442</b>	<b>16.813</b>	<b>18.331</b>	<b>21.109</b>	<b>23.991</b>	<b>26.569</b>

Sumber: BPS, 2013

Kota Binjai memiliki pendapatan perkapita tinggi di Sumatera Utara yang didukung oleh fungsinya sebagai kota penyangga untuk ibu kota Provinsi Sumatera Utara sehingga menerima dampak perkembangan. Sementara itu Kota Sibolga memiliki pelabuhan alam yang kedalaman lautnya memadai untuk kapal besar. Pelabuhan ini merupakan pintu gerbang keluar masuknya barang dan penumpang melalui Pantai Barat Sumatera Utara. Kota Sibolga selain berfungsi sebagai kota pelabuhan juga merupakan pusat perdagangan di Pantai Barat Sumatera Utara dan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan wilayah pembangunan Sumatera Utara.

## C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

### 1. Transformasi Struktural (Industrialisasi) Berjalan Lambat

Struktur perekonomian daerah secara sektoral relatif seimbang. Pada tahun 2013 peran industri pengolahan dan pertanian relatif sama besar, diikuti dengan sektor perdagangan (Tabel 2). Industri pengolahan yang menjadi sektor andalan antara lain industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan seperti minyak kelapa sawit (CPO), rotan, kayu lapis, *cramb rubber*, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan potensi Sumatera Utara sebagai pusat pengembangan industri nasional khususnya di wilayah Sumatera Bagian Utara.

**Tabel 2**  
**Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Pertanian	21,32	22,46
2.	Pertambangan	1,30	1,13
3.	Industri Pengolahan	21,58	20,08
4.	Listrik, Gas, Air Minum	0,85	0,71
5.	Konstruksi	6,92	7,03
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	19,29	19,21
7.	Angkutan, Telekomunikasi	9,55	10,46
8.	Keuangan	7,68	8,44
9.	Jasa-jasa	11,51	10,48
Total PDRB		100.00	100.00

*Sumber: BPS, 2013*

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian dan jasa-jasa merupakan penyedia kesempatan kerja terbesar. Sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi tertinggi dalam struktur perekonomian Sumatera Utara justru berkurang kemampuannya dalam menyediakan lapangan kerja (Tabel 3). Fenomena ini menunjukkan kesenjangan sektoral, di mana sektor yang tumbuh tinggi tidak berkontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja, dan sebaliknya sektor penyerap tenaga kerja tumbuh lambat. Ke depan perlu didorong industrialisasi di daerah untuk mengatasi dilema ini. Sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor lain yang kurang produktif.

**Tabel 3**  
**Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014**

No.	Lapangan Pekerjaan	2010	2014 (Feb)	Perubahan
1	Pertanian	2.798.751	3.057.852	259.101
2	Pertambangan	21.026	51.183	30.157
3	Industri Pengolahan	530.364	399.691	-130.673
4	Listrik, Gas, Air	7.345	11.068	3.723
5	Bangunan	231.825	252.846	21.021
6	Perdagangan, Hotel, Restoran	1.215.946	1.197.145	-18.801
7	Angkutan & Telekomunikasi	310.624	348.073	37.449
8	Keuangan	73.986	101.837	27.851
9	Jasa-Jasa	700.199	944.228	244.029
Total		5.890.066	6.363.923	473.857

*Sumber: BPS, 2014*

Fenomena yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatnya proporsi pekerjaan kurang berkualitas di Sumatera Utara. Selama empat tahun terakhir jenis pekerjaan ini justru meningkat meskipun perekonomian daerah bertumbuh positif. Termasuk dalam kelompok pekerjaan kurang berkualitas adalah pekerja bebas bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tak dibayar. Para pekerja di kelompok ini umumnya memiliki produktivitas rendah, menerima upah yang rendah, serta menghadapi ketidakpastian.

Dari sisi industri unggulan daerah, secara umum diversifikasi industri di Sumatera Utara berjalan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya sektor *tradable* (dapat diperdagangkan antardaerah) yang memiliki nilai LQ lebih besar dari satu (Tabel 4). Nilai LQ lebih dari satu menunjukkan sektor basis daerah, di mana Sumatera Utara memiliki keunggulan komparatif dibandingkan rata-rata daerah lain. Kondisi ini nampak di semua subsektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan), industri makanan-minuman, industri barang kayu, industri pupuk dan karet, industri semen dan galian, dan industri logam dasar.

**Tabel 4**  
**Nilai LQ Sektor Ekonomi Sumatera Utara 2008-2012**

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan</b>	1,74	1,75	1,79	1,82	1,83
a. Tanaman Bahan Makanan	1,16	1,15	1,18	1,19	1,18
b. Tanaman Perkebunan	4,48	4,64	4,74	4,88	4,91
c. Peternakan	1,45	1,46	1,45	1,46	1,45
d. Kehutanan	1,68	1,69	1,63	1,62	1,68
e. Perikanan	1,13	1,13	1,18	1,15	1,14
<b>2. Pertambangan dan Penggalian</b>	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15
a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13
b. Pertambangan Bukan Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Penggalian	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
<b>3. Industri Pengolahan</b>	0,85	0,86	0,85	0,82	0,80
a. Industri Migas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
1). Pengilangan Minyak Bumi	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13
2). Gas Alam Cair (LNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri Bukan Migas	0,93	0,93	0,92	0,88	0,85
<b>4. Listrik, Gas &amp; Air Bersih</b>	1,01	0,93	0,94	0,97	0,95
a. Listrik	1,06	1,03	1,04	1,03	1,00
b. Gas	0,37	0,28	0,30	0,37	0,32
c. Air Bersih	1,77	1,79	1,80	1,85	1,89
<b>5. Konstruksi</b>	1,06	1,05	1,05	1,07	1,07
<b>6. Perdagangan, Hotel &amp; Restoran</b>	1,05	1,09	1,07	1,05	1,05
a. Perdagangan Besar dan Eceran	1,13	1,18	1,15	1,12	1,11
b. Hotel	0,42	0,42	0,42	0,41	0,41
c. Restoran	0,77	0,76	0,77	0,80	0,81

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
<b>7. Pengangkutan dan Komunikasi</b>	1,17	1,08	1,04	1,03	1,02
a. Pengangkutan	2,09	2,11	2,15	2,20	2,23
1). Angkutan Rel	1,20	1,18	1,20	1,34	1,57
2). Angkutan Jalan Raya	2,04	2,08	2,14	2,19	2,20
3). Angkutan Laut	1,05	1,10	1,16	1,22	1,10
4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan	0,39	0,40	0,39	0,41	0,41
5). Angkutan Udara	4,01	3,87	3,68	3,62	3,73
6). Jasa Penunjang Angkutan	1,56	1,54	1,56	1,57	1,61
b. Komunikasi	0,41	0,36	0,33	0,32	0,31
<b>8. Keuangan, Real Estate &amp; Jasa Perusahaan</b>	0,74	0,74	0,78	0,82	0,86
a. Bank	0,52	0,54	0,62	0,70	0,79
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	0,44	0,42	0,42	0,44	0,44
c. Jasa Penunjang Keuangan	0,66	0,69	0,70	0,71	0,71
d. Real Estat	1,24	1,24	1,24	1,28	1,28
e. Jasa Perusahaan	0,54	0,53	0,53	0,54	0,54
<b>9. Jasa-jasa</b>	1,07	1,07	1,07	1,09	1,11
a. Pemerintahan Umum	1,62	1,64	1,67	1,72	1,81
b. Swasta	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63
1). Jasa Sosial Kemasyarakatan	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75
2). Jasa Hiburan dan Rekreasi	1,46	1,45	1,45	1,44	1,44
3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga	0,51	0,49	0,49	0,49	0,49

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

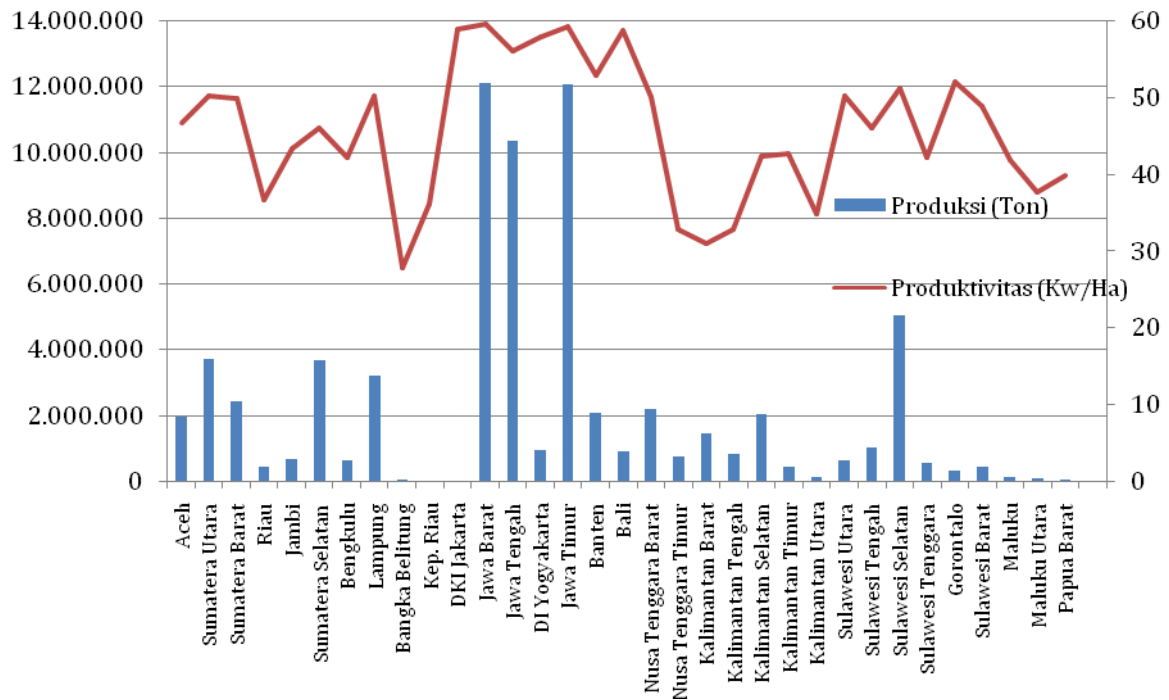
Potensi pengembangan sektor-sektor andalan daerah tersebut sangat besar, khususnya terkait dengan keuntungan aglomerasi yang dimiliki Sumatera Utara. Aglomerasi akan memfasilitasi industrialisasi melalui *linkage* antarsektor. Ke depan perlu didorong industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah seperti pengolahan hasil perkebunan, industri turunan kelapa sawit dan karet, serta pengolahan kopi. Sektor-sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur industri nasional yang memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar dunia.

## 2. Produktivitas Sektor Pertanian Masih Rendah

Salah satu peran penting Sumatera Utara bagi perekonomian wilayah dan nasional adalah sebagai penghasil komoditas pertanian yang besar. Produksi padi daerah ini memiliki surplus yang berpotensi mendukung ketahanan pangan wilayah. Secara nasional Sumatera Utara merupakan penghasil padi terbesar kelima dengan produksi mencapai 3,73 juta ton padi kering giling pada tahun 2013 (Gambar 9). Dengan asumsi faktor konversi padi ke beras sebesar 62,74 persen, dan tingkat konsumsi beras per kapita 139,15 kg per tahun, maka Sumatera Utara berpotensi memiliki surplus beras sekitar 447 ribu ton. Angka ini cukup signifikan untuk mendukung target surplus beras nasional sebesar 10 juta ton beras per tahun.



**Gambar 9**  
**Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi 2013**



Sumber: BPS, 2013

Tingkat produktivitas padi di Sumatera Utara tahun 2013 masih rendah, yaitu sebesar 50,17 kwintal per hektar. Angka ini jauh tertinggal dari tingkat produktivitas Jawa Timur yang hampir mencapai 60 kwintal per hektar. Jika produktivitas daerah bisa ditingkatkan menyamai Jawa Timur, maka produksi padi Sumatera Utara akan meningkat secara signifikan sekitar 25 persen. Mengingat masih besarnya peran sektor pertanian baik dalam pembentukan nilai tambah maupun penyediaan lapangan kerja, maka peningkatan produktivitas di sektor pertanian berpotensi meningkatkan kinerja pertumbuhan daerah, kesejahteraan rakyat, dan peran daerah dalam ketahanan pangan nasional.

### 3. Pertumbuhan Ekonomi Masih Perlu Didorong Investasi

Dari sisi penggunaan, pendorong utama perekonomian Sumatera Utara adalah konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor (Tabel 5). Pangsa konsumsi rumah tangga dalam PDRB mencapai 59,74 persen pada tahun 2013. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, hal ini sebenarnya kurang ideal. Konsumsi meskipun menyelamatkan perekonomian domestik selama krisis global tidak bisa diandalkan sebagai mesin pendorong pertumbuhan daerah dalam jangka panjang. Pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi akan menggerus potensi tabungan masyarakat. Pertumbuhan tinggi memerlukan penambahan stok kapital untuk menunjang produksi di sektor riil. Oleh karena itu peran investasi dalam perekonomian perlu ditingkatkan.

**Tabel 5**  
**Struktur PDRB Menurut Penggunaan, 2013**

No.	Lapangan Usaha	Distribusi Persentase (%)	
		PDRB ADHB	PDRB ADHK 2000
1.	Konsumsi Rumah Tangga	59,74	63,12
2.	Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,31	0,42
3.	Konsumsi Pemerintah	9,86	9,34
4.	PMTB	21,57	20,43
5.	Perubahan Stok	0,63	1,56
6.	Ekspor	42,33	50,26
7.	Impor	34,44	45,13
		100.0	100.0

*Sumber : BPS, 2013*

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Sumatera Utara secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

#### **4. Kondisi Infrastruktur Wilayah Kurang Memadai untuk Mendukung Logistik yang Efisien**

Dalam konteks pengembangan wilayah Sumatera, posisi Sumatera Utara sangat strategis dan berpotensi menjadi salah satu pusat pertumbuhan di wilayah Sumatera. Infrastruktur berperan penting karena memfasilitasi pemusatan maupun penyebaran aktivitas ekonomi secara alami. Defisiensi infrastruktur baik secara kuantitas maupun kualitas akan menghambat distribusi barang secara efisien, yang merupakan salah satu pilar utama daya saing wilayah. Dari sisi kuantitas, jaringan jalan di Sumatera Utara dapat dikatakan cukup baik. Kerapatan jalan wilayah, yaitu ukuran yang merupakan rasio antara panjang jalan dan luas wilayah, masih lebih tinggi dari kerapatan jalan nasional (Tabel 6).

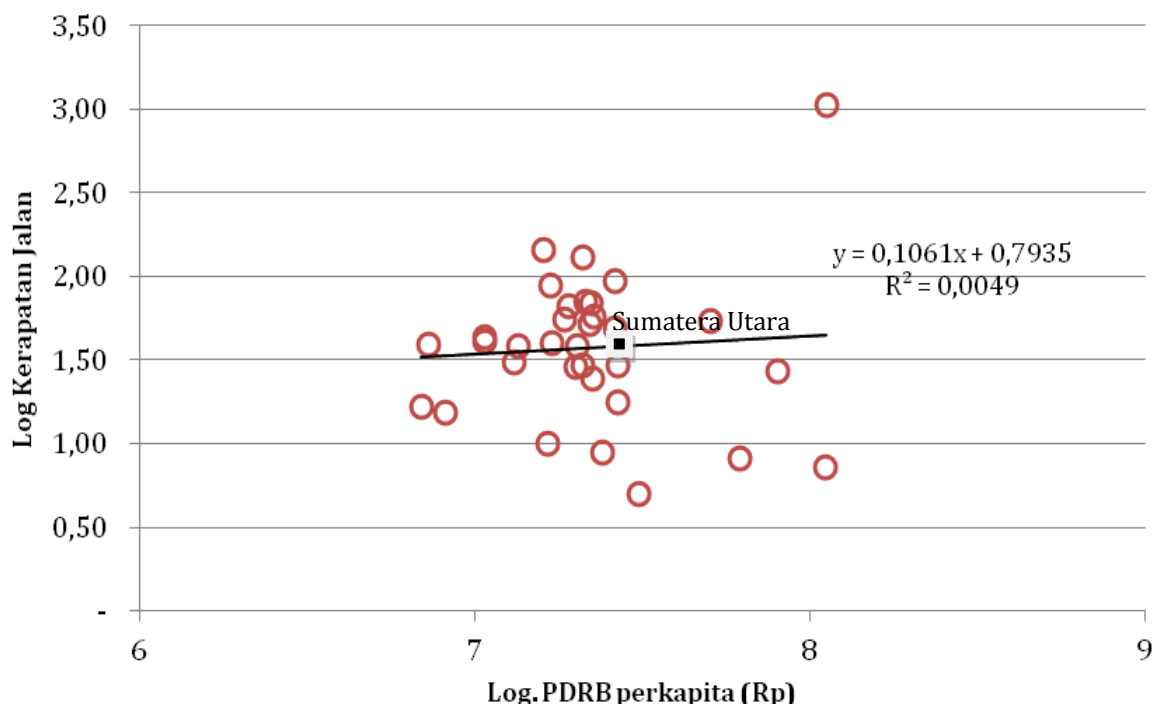
**Tabel 6**  
**Kerapatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012**

No	Provinsi	PDRB per kapita (Ribu Rp)	Kerapatan Jalan
1	DKI Jakarta	111.913	1.068,36
2	DIY	16.054	146,56
3	Bali	20.948	130,28
4	Jawa Timur	26.274	95,37
5	Jawa Tengah	16.864	88,75
6	Jawa Barat	21.274	72,08
7	Sulawesi Selatan	22.151	69,68
8	Banten	19.038	66,81
9	Sulawesi Utara	22.624	57,89
10	Lampung	18.460	56,44
11	Kep. Riau	50.174	54,95
12	Sumatera Barat	22.035	52,36
<b>13</b>	<b>Sumatera Utara</b>	<b>26.185</b>	<b>49,50</b>
14	NTB	10.691	43,55
15	Gorontalo	10.703	40,85
16	Sulawesi Barat	17.012	40,62
17	NTT	7.236	39,95
18	Bengkulu	13.522	38,99
19	Aceh	20.164	38,76
20	Sulawesi Tenggara	13.112	30,71
21	Kep. Bangka Belitung	26.784	29,93
22	Sulawesi Tengah	21.052	29,73
23	Kalimantan Selatan	20.051	29,28
24	Riau	79.786	27,25
25	Jambi	22.508	24,81
26	Sumatera Selatan	26.742	17,86
27	Maluku Utara	6.929	16,72
28	Maluku	8.134	15,39
19	Kalimantan Barat	16.421	10,00
30	Kalimantan Tengah	23.987	8,96
31	Papua Barat	61.462	8,24
32	Kalimantan Timur	111.210	7,22
33	Papua	30.713	5,06
	<b>Indonesia</b>	<b>33.531</b>	<b>25,99</b>

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Untuk mengetahui tingkat defisiensi infrastruktur wilayah dilakukan dengan membandingkan kerapatan jalan daerah dengan kerapatan jalan di provinsi-provinsi dengan tingkat pendapatan per kapita yang setara. Dari hasil regresi 33 provinsi di Indonesia diperoleh gambaran bahwa tingkat kerapatan jalan di Sumatera Utara masih lebih tinggi dari rata-rata kerapatan jalan di provinsi lain di Indonesia (Gambar 10). Dengan demikian dapat dikatakan secara kuantitas jaringan jalan daerah relatif cukup, dan Sumatera Utara tidak mengalami defisiensi infrastruktur jalan.

**Gambar 10**  
**Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012**



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Namun demikian, panjang jalan yang memadai tersebut ternyata baru separuhnya yang sudah beraspal. Jika dilihat dari kondisi permukaannya, maka hanya sekitar 30 persen jalan wilayah yang berada dalam kondisi baik. Kondisi jaringan jalan semacam ini tentu mengakibatkan bertambahnya waktu tempuh distribusi barang, mempercepat kerusakan armada transportasi, dan meningkatkan risiko kerusakan komoditas selama pengiriman, dan sebagai akibatnya biaya distribusi menjadi tinggi.

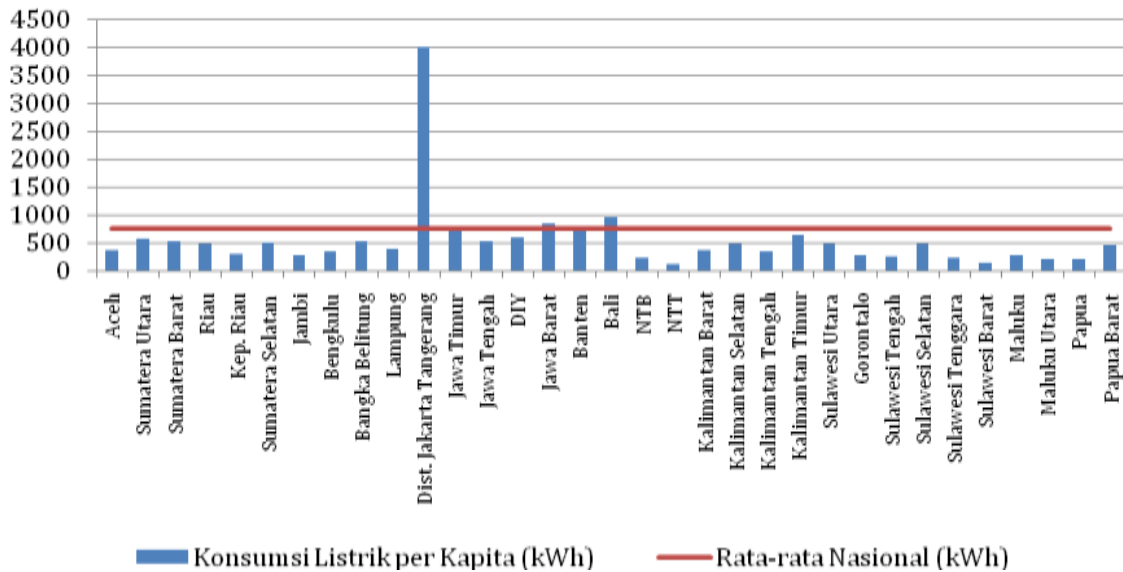
**Tabel 7**  
**Jalan Menurut Jenis Permukaan, 2011**

PROVINSI	JENIS PERMUKAAN JALAN								Total	
	Aspal		Kerikil		Tanah		Lainnya			
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
Sumatera Utara	18.396	49	5.561	15	10.299	27	3.266	9	37.522	100
Sumatera	74.399	50	30.509	20	39.739	27	5.258	4	149.905	100
INDONESIA	258.743	59	72.934	17	91.444	21	14.638	3	437.759	100

Sumber: BPS, 2012

Infrastruktur penting berikutnya adalah listrik, yang dominan dalam memfasilitasi industrialisasi. Jika dilihat dari tingkat konsumsi listrik per kapita, kondisi di Sumatera Utara relatif rendah dan di bawah angka rata-rata nasional (Gambar 11).

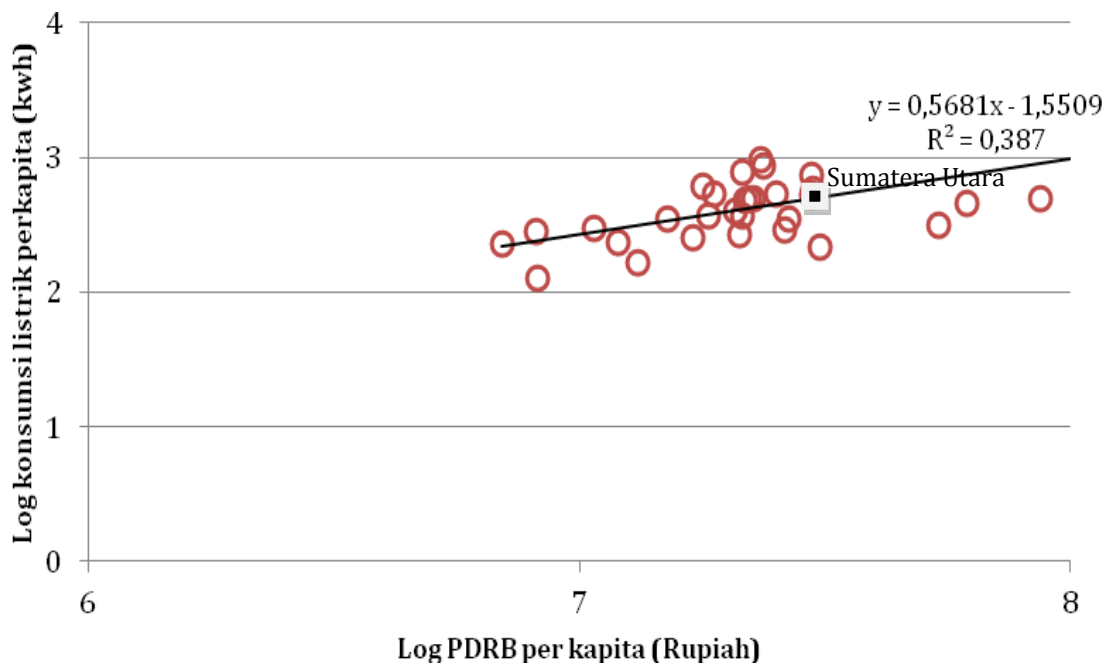
**Gambar 11**  
**Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013**



Sumber: Statistik PLN, 2013

Demikian juga bila diperbandingkan provinsi lain di Indonesia, konsumsi listrik per kapita di Sumatera Utara lebih rendah dari seharusnya (Gambar 12). Jika secara umum, tingkat konsumsi listrik nasional dibatasi oleh kapasitas produksi listrik, maka kondisi ini menunjukkan ketersediaan listrik menjadi faktor kritis bagi pertumbuhan wilayah.

**Gambar 12**  
**Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013**



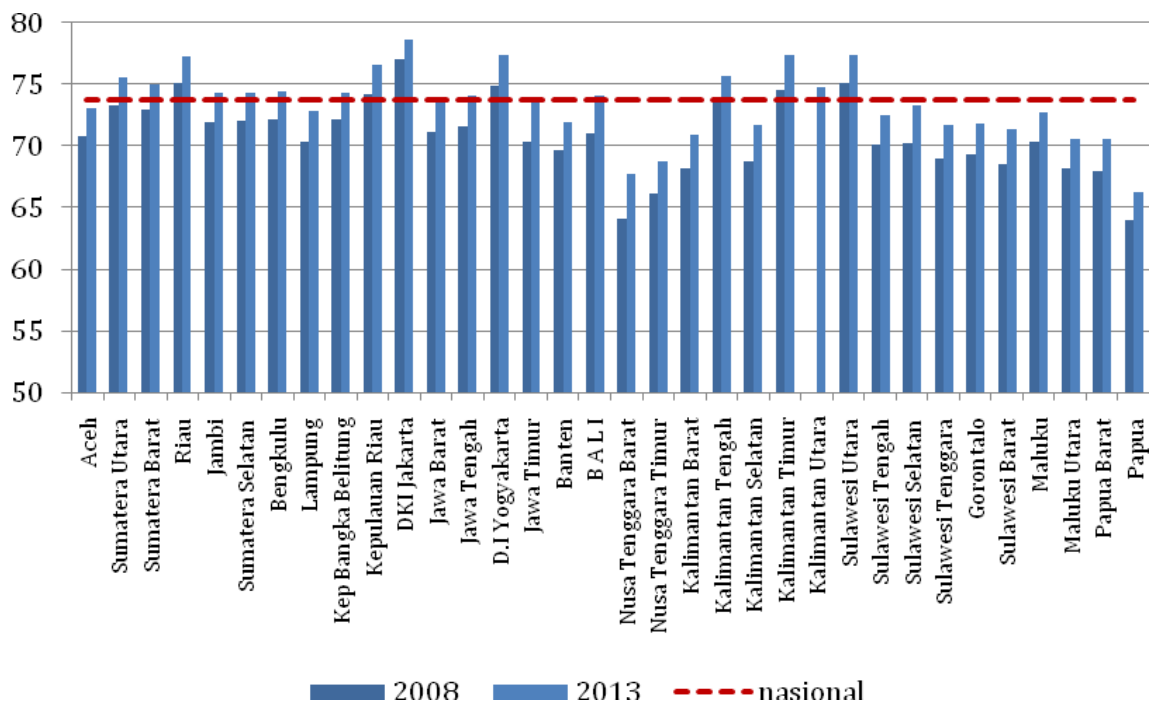
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) – diolah

## 5. Kualitas Sumber Daya Manusia

Faktor kualitas sumber daya manusia tidak bisa diabaikan dalam percepatan pertumbuhan daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu transmisi kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian. Kemajuan teknologi inilah yang menjadi penentu keberlanjutan pertumbuhan dalam jangka panjang. Kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif meningkat tahun 2013 dibandingkan tahun 2008, dan sudah berada di atas IPM nasional sebesar 73,81 (Gambar 13). Dari 34 provinsi di Indonesia, IPM Sumatera Utara berada pada peringkat 8 dengan nilai IPM sebesar 75,55 pada tahun 2013. Pada indikator usia harapan hidup, terjadi perbaikan dari 69,2 tahun pada tahun 2008 menjadi 69,9 tahun pada tahun 2013. Rata-rata lama sekolah di Sumatera Utara meningkat dari 8,6 tahun pada 2008 menjadi 9,1 tahun pada 2013. Sementara itu pada indikator angka melek huruf, capaian di Sumatera Utara pada tahun 2008 dan 2013 meningkat dari 97,08 menjadi 97,84 persen.

Dampak rendahnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan terhadap perekonomian daerah salah satunya tercermin dari kualitas angkatan kerja daerah. Dalam hal ini, porsi angkatan kerja dengan jenjang pendidikan yang ditamatkan setara minimal SMA di Sumatera Utara masih termasuk rendah. Meskipun meningkat dalam tiga tahun terakhir, porsi angkatan kerja relatif terdidik ini baru mencapai 40 persen pada tahun 2014. Ketersediaan angkatan kerja terdidik dalam porsi yang memadai akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan wilayah melalui proses spesialisasi dan aglomerasi.

**Gambar 13**  
**Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013**

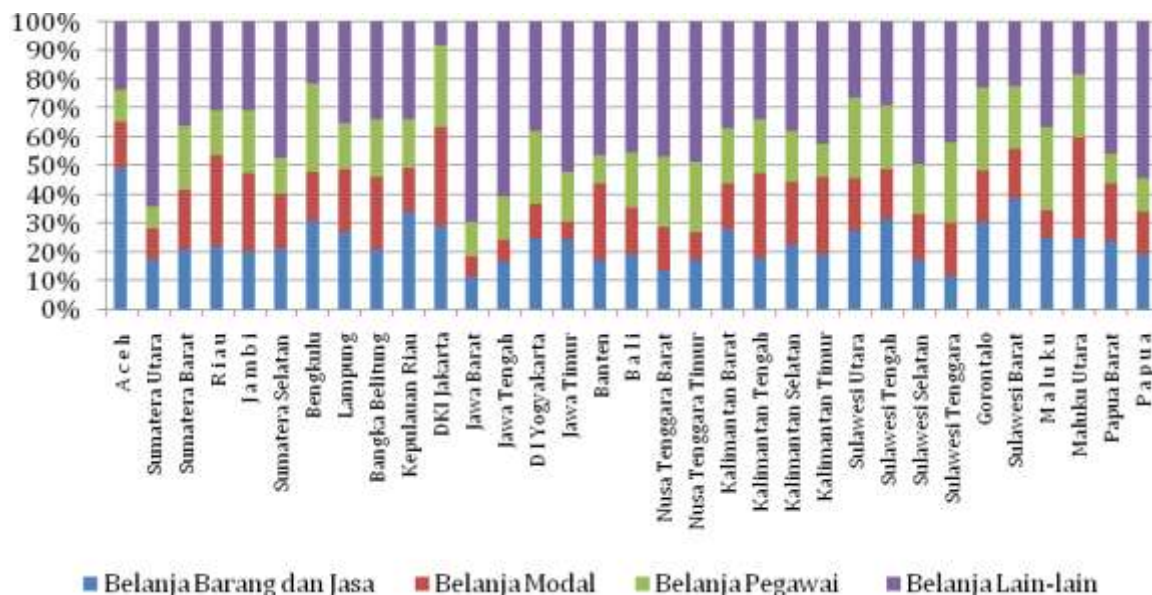


Sumber: BPS, 2013

## 6. Kualitas Belanja Pemerintah Daerah Kurang Mendukung Pertumbuhan

Terbatasnya kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah menuntut peran pemerintah dalam pembiayaan prasarana publik. Porsi belanja modal dalam APBD (seluruh kabupaten/kota dan provinsi) di Sumatera Utara tahun 2013 relatif kecil, yaitu sebesar 10,31 persen dari total belanja, sementara itu porsi belanja pegawai dari total APBD besarnya 7,02 persen (Gambar 14). Porsi APBD seperti ini kurang responsif terhadap kebutuhan riil percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini menjadi kontradiktif bila dihubungkan dengan kondisi kerusakan jalan yang parah di Sumatera Utara. Infrastruktur wilayah merupakan salah satu kunci utama daya saing dan daya tarik daerah. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, sulit diharapkan terealisasinya potensi investasi yang besar di Sumatera Utara, baik yang berasal dari domestik (dalam daerah) maupun dari luar.

**Gambar 14**  
**Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013**



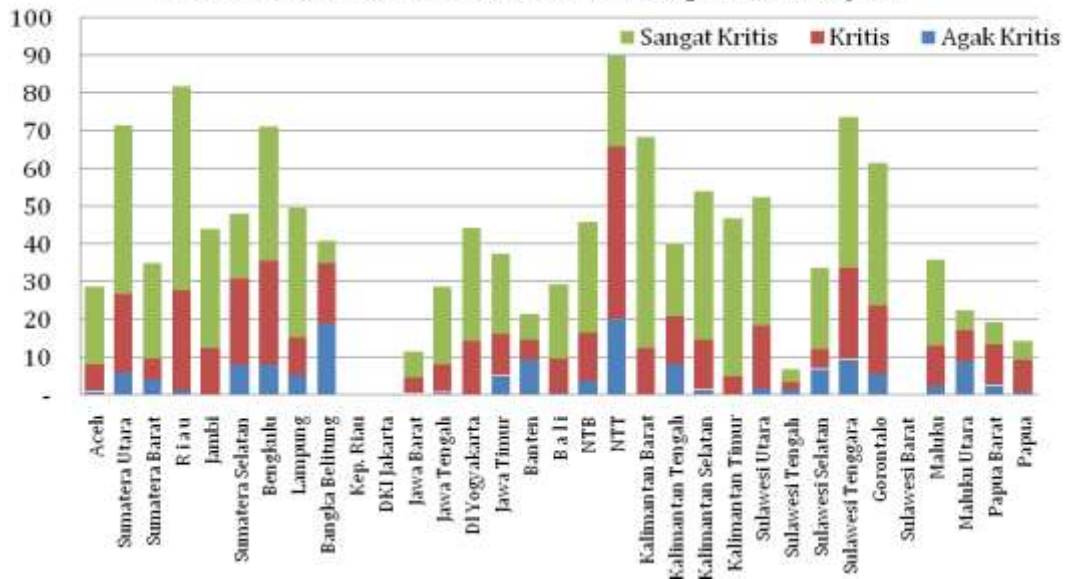
Sumber: BPS, 2013

## 7. Daya Dukung Lingkungan Berkurang

Pertumbuhan sektor perkebunan dan industri juga diiringi dengan memburuknya daya dukung lingkungan. Secara nasional, tingkat kerusakan lingkungan di Sumatera Utara termasuk tinggi, dengan luas lahan kritis pada tahun 2012 telah mencapai lebih dari 7 juta hektar (gambar 15). Luasan ini hampir mencakup 70 persen dari luas wilayah.



**Gambar 14**  
**Persentase Luas Lahan Kritis terhadap Luas Wilayah**



Sumber: BPS, 2012

Rendahnya daya dukung lingkungan mengancam keberlanjutan pertumbuhan, apalagi untuk perekonomian yang masih bertumpu pada sumber daya alam dan jasa lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bisa sangat luas yang meliputi penurunan tingkat kesuburan tanah, menurunnya keragaman hayati, meningkatnya kerentanan bencana alam, pendangkalan daerah aliran sungai, dan berkurangnya kualitas sumber daya air wilayah. Diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk memulihkan daya dukung lingkungan agar prospek pertumbuhan daerah tetap terjaga.

#### D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Dengan potensi yang dimilikinya serta perkiraan dinamika lingkungan yang mempengaruhi, perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan tumbuh positif hingga tahun 2015. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi sumber pertumbuhan, namun peran investasi diperkirakan akan meningkat. Membaiknya kualitas infrastruktur diperkirakan akan diikuti meningkatnya minat investor dalam mengembangkan industri pengolahan. Sementara itu ekspor, khususnya ke luar negeri, akan menghadapi tantangan berat terkait pelambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju. Melemahnya permintaan produk akhir akan diikuti pelemahan permintaan bahan baku. Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 6,1 – 8,1 persen dapat tercapai. Selama tahun 2014 kinerja ekonomi Sumatera Utara mengalami perbaikan. Investasi yang membaik menjadi faktor pendukung perbaikan kinerja ekonomi di Pulau Sumatera. Hal ini juga didukung oleh peningkatan pembangunan proyek pemerintah yang terus berjalan di tahun 2015. Kinerja sektor pertanian akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya

kinerja perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara. Komoditas kelapa sawit diperkirakan terus tumbuh seiring dengan permintaan domestik dan dunia yang terus meningkat.

2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 9,2 – 6,7 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 10,06 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Sumatera Utara harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 3,36 poin persentase atau 0,56 poin persentase per tahun. Peluang untuk mempercepat penurunan kemiskinan masih terbuka bila dilakukan pembenahan pada produktivitas sektor pertanian dan industri padat karya, dua lapangan usaha di mana konsentrasi penduduk miskin berada.

## **E. Penutup**

### **1. Isu Strategis**

Dari analisis di atas, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan daerah. Isu-isu tersebut adalah permasalahan yang bila ditangani akan berdampak besar pada pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan daerah. Sebaliknya bila permasalahan tersebut diabaikan, maka berpotensi menimbulkan dampak buruk berantai pada sasaran-sasaran pembangunan lainnya. Isu-isu strategis tersebut adalah:

- a. Pengembangan industri unggulan daerah
- b. Peningkatan iklim investasi
- c. Peningkatan produktivitas pertanian
- d. Pembangunan infrastruktur wilayah
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah
- g. Pemulihan daya dukung lingkungan

### **2. Rekomendasi kebijakan**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, disarankan beberapa kebijakan operasional sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan proses perijinan usaha dengan mengurangi waktu dan besarnya biaya yang diperlukan.
- b. Pemantapan dan pemeliharaan jaringan jalan wilayah.
- c. Peningkatan kapasitas produksi listrik wilayah.
- d. Peningkatan penyuluhan pertanian dan akses petani terhadap teknologi tepat guna.
- e. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- f. Perbaikan distribusi dan akses petani pada sarana produksi pertanian.
- g. Peningkatan akses pendidikan menengah dan pendidikan vokasional.
- h. Revitalisasi balai latihan kerja.
- i. Peningkatan alokasi belanja modal pemerintah untuk infrastruktur daerah.
- j. Rehabilitasi lahan kritis dan pengendalian pemanfaatan lahan untuk perkebunan dan pertambangan.